

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS**

**MUH. HAERIL ARIF
NIM : 1560302029**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS**

Sebagai salah satu persyaratan untuk
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

MUH. HAERIL ARIF
NIM : 1560302029

Kepada

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS**

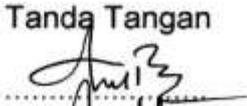
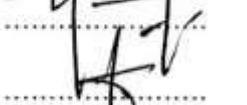
disusun oleh:

Muh. Haeril Arif

1560302029

Telah diujikan dan diseminarkan
pada tanggal 17 Juli 2019

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Hj. Mulyahati Renreng, S.E.,M.Si	Ketua	
Sri Wahyuni Nur, SE.,M.Ak	Anggota	
H. Ahmad Yusdarwin Waworuntu, SE.,MM	Anggota	
Zainal Abidin, S.E.,M.M	Anggota	

Maros, 20 Agustus 2019
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,


Dr. Dahlan, S.E., M.M.
NIDN. 0931125807

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : MUH. HAERIL ARIF

Nomor Induk Mahasiswa : 1560302029

Program Studi : Manajemen

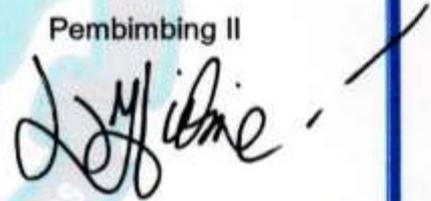
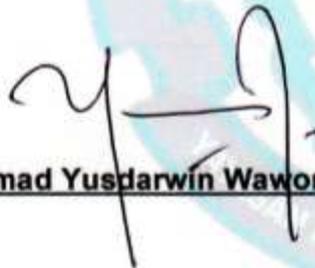
Konsentrasi : Keuangan

Telah diperiksa dan setuju untuk diujikan.

Maros, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Ahmad Yusdarwin Waworuntu, SE., MM

Zainal Abidin, SE., M. Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros



Dr. Dahlan, SE., MM.
NIP. 19581231 197907 1 038

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. HAERIL ARIF
NIM : 1560302029
Jurusan/Program Studi : Manajemen S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS

Adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Maros, 03 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan



MUH. HAERIL ARIF

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros**”. Serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Muslim Maros (UMMA).

Perjalanan panjang yang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah dan dukungan Kedua orang tua, ayah tercinta Arif dan Ibu tersayang Salmia yang selalu memberikan kasih sayang, menyemangati serta Do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Dr.H.M. Ikram Idrus, SE,.MS. Selaku Ketua Yayasan Perguruan Islam Maros.

2. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus, M.Sc.,Ph.D Selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
3. Bapak Dr. Dahlan, S.E.,MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
4. Bapak H.Ahmad Yusdarwin Wowuruntu,SE.,MM selaku pembimbing I yang selalu memberi arahan, bantuan, nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Zainal Abidin, SE., M.Si selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberi masukan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Nur Pratiwi,S.E.,M.Sc selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan Pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Andi Rosman,S.Sos, M.M Selaku kepala Dinas beserta segenap staf Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Ir. H. Takdir, MM selaku Kepala Badan dan segenap staf Badan Keuangan Daerah (BKD) kabupaten maros yang telah memberi izin penelitian dan membantu dalam proses penelitian.

10. Segenap keluarga yang tiada henti-hentinya memberi semangat dalam menjalani perkuliahan kedua adik yang merupakan sumber penyemangat bagi saya.

11. Seluruh teman-teman seangkatan, Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM) FEB UMMA khususnya sahabat-sahabat penulis yang tiada henti-hentinya memberi semangat dan menjadi teman bertukar ilmu selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki dan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Manajemen Keuangan.

Maros, 20 Juni 2019
Penulis,

(Muh Haeril Arif)

ABSTRAK

MUH HAERIL ARIF.2019. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros* (dibimbing oleh Ahmad Yusdarwin Wowuruntu dan Zainal Abidin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros tahun 2013-2017 dengan melakukan analisis menggunakan rasio keuangan daerah.

Pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, sumber data diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan melakukan analisis dengan rumus: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam periode tahun 2013 sampai tahun 2017 dikategorikan baik, hal itu dapat dilihat dari (1) Rasio Kemandirian dikategorikan pola hubungan instruktif, (2) Rasio Efektivitas PAD kinerja keuangan Kabupaten Maros tidak efektif, (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah keuangan Kabupaten Maros dikategorikan efisien, (4) Rasio Keserasian dalam lima tahun terakhir yaitu menunjukkan perbandingan antara belanja operasi sebesar 65,14 % dan belanja modal sebesar 29,88 % dan (5) Rasio Pertumbuhan dilihat dari empat aspek penting yaitu pertumbuhan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2013-2016 dan bertumbuh secara negatif pada tahun 2017, pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif dengan *trend* menurun, pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan positif dengan *trend fluktuatif* pada tahun 2013-2016 dan bertumbuh secara negatif pada tahun 2017.

Kata Kunci : Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Keuangan Daerah	8
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9
C. Kinerja Keuangan Daerah	20
D. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	22
E. Penelitian Terdahulu	29
F. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Metode Analisis.....	34
E. Definisi Operasional Variabel	35
BAB IV SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN	
A. Kabupaten Maros.....	37
B. Badan keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Maros	47
BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Data.....	58
B. Rencana Biaya.....	67

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah..	24
2. Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas.....	25
3. Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah	26
4. Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	29
5. Tabel 4.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan status Kepegawaian.....	48
6. Tabel 4.2 komposisi sumber daya manusia aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan tingkat pendidikan	49
7. Tabel 4.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)	50
8. Tabel 4.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan pangkat dan golongan	50
9. Tabel 5.1 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Maros .	59
10. Tabel 5.2 Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Maros.....	60
11. Tabel 5.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Maros.....	63
12. Tabel 5.4 Rasio Keserasian Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	64
13. Tabel 5.4 Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	66

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Gambar 2.1 Kerangka Pikir	32
2. Gambar 4.1 Wilayah Kabupaten Maros.....	38
3. Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.....	46
4. Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.....	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kondisi geografis yang sangat unik dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan luas wilayah 1,904,569 km² dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau serta letak Indonesia yang terletak diantara dua benua (benua Asia dan benua Australia) dan dua samudera (samudera Hindia dan samudera Pasifik) menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat potensial dengan letak geografis yang menguntungkan sebagai jalur perdagangan dunia, namun yang menjadi tantangan untuk Indonesia yaitu mampukah pemerintah Indonesia mengelola dan mengoptimalkan potensi tersebut dengan luas negara begitu besar dan penduduk yang memiliki latar belakang suku, budaya yang berbeda-beda.

alah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu negara ialah bagaimana menciptakan tata kelola yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Meskipun demikian pemerintahan atau organisasi publik saat ini juga menghadapi tantangan besar dengan lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, adanya kebijakan *otonomi* daerah karena salah satu tujuan kebijakan *desentralisasi* dan *otonomi* daerah adalah untuk

menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenali kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya, selain dari itu pemerintah daerah juga harus menerima konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu aspek dari Pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati yaitu dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah tidak akan lepas dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. (UU No. 23

Tahun 2014 pasal 1), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, dimana APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD dapat digunakan sebagai alat dalam menjalankan fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi serta fungsi distribusi terhadap besarnya anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan *akuntabilitas* (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Alat dalam menganalisa kinerja pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Secara umum analisis rasio keuangan daerah digunakan dengan tujuan menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, serta

melihat pertumbuhan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama satu periode tertentu.

Mutiha (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014, Dari penelitian ini disimpulkan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain, pemerintah kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun pemerintah kota Bogor masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Lazyra (2016) juga melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan, Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah daerah kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh pemerintah daerah kota Medan, rasio kemandirian yang masih dibawa standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah kota Medan dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang masih dibawa standar terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut, untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar terjadi

dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target.

Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otonomi daerah yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas. Peneliti memilih salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Maros. Kabupaten Maros menjadi menarik sebagai salah satu obyek penelitian karena kabupaten Maros merupakan kabupaten dengan potensi ekonomi serta pembangunan yang baik karena letak yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan kabupaten Maros sebagai wilayah yang baik untuk berinvestasi, selain itu berdasarkan APBD kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai dengan 2017, dimana tingkat anggaran pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Maros secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2013 sebesar Rp.920.121.245.914 dan pada tahun anggaran 2017 mencapai Rp.1.418.289.224.853, serta Kabupaten Maros juga berhasil meraih prestasi dibidang pengelolaan keuangan, keberhasilan itu ditandai dengan diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel, atas laporan keuangan tahun 2017 dimana penghargaan tersebut merupakan kali kelima diraih kabupaten Maros secara berturut-turut semenjak 2014 hingga tahun 2018.

Dengan peningkatan anggaran pendapatan pemerintah daerah kabupaten Maros maka akan muncul sebuah pertanyaan yaitu bagaimana

kemampuan pemerintah daerah kabupaten Maros dalam mengelola keuangannya dari bagaimana pendapatan daerah tersebut didapatkan, untuk apa dan bagaimana pendapatan daerah dibelanjakan, serta bagaimana kemampuan pemerintah daerah kabupaten Maros mengembalikan pinjamannya. Maka untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah kabupaten Maros dalam Mengelola keuangannya dilakukan analisis terhadap laporan realisasi APBD kabupaten Maros dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah (REKD), rasio keserasian, serta rasio pertumbuhan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam mengelola keuangan daerahnya dengan mengangkat judul, **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Maros dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini yaitu mengetahui gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Maros dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan daerah.

2. Manfaat praktis

a. Instansi pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Maros.

b. Pihak Lainnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan untuk pihak-pihak lainnya yang membutuhkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Halim dan Kusufi (2012:43) yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten , kota atau provinsi) yang memerlukan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keuangan merupakan faktor yang paling mendominasi dalam pengukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Keuangan daerah juga menjadi penentu bentuk dan ragam yang akan dilakukan pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung (Halim dan Kusufi, 2012:230).

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Menurut Mahsun (2012:81) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda (UU N0. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 32). Dimana kebijakan umum APBD yang kemudian disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 2, struktur APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU NO. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 35). Sumber Pendapatan Daerah Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 pasal 285 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

Menurut Halim dan Kusufi (2012:181) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah sedangkan menurut UU No.33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari:

1) Pajak daerah

Jenis pajak daerah berdasarkan PP NO. 55 Tahun 2016 pasal 2 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak yaitu dimana pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. kemudian kedua jenis pajak ini dibagi kembali berdasarkan pihak yang

melakukan perhitungan atau yang menetapkan, pembagian tersebut tercantum di dalam PP NO. 55 Tahun 2016 Pasal 3, yaitu:

- a) Pajak provinsi. Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari: (1) Pajak kendaraan bermotor, (2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan, dan (3) Pajak air permukaan, kemudian jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak terdiri atas: (1) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (2) pajak rokok.
- b) Pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota berdasarkan penetapan Kepala Daerah yaitu: (1) Pajak reklame, (2) Pajak air dan tanah, dan (3) PBB-P2, kemudian yang menjadi Jenis Pajak kabupaten/kota berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas: (1) Pajak hotel, (2) Pajak restoran, (3) Pajak hiburan, (4) Pajak penerangan jalan, (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (6) Pajak parkir (7) Pajak sarang burung walet dan (8) BPHTB.

2) Retribusi daerah

Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. Retribusi daerah dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c) Retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

Halim dan Kusufi (2012:104) berpendapat bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD, (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain pendapatan yang sah

Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat 2 dibagi atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Yang termasuk transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yaitu, sebagai berikut:

1) Transfer pemerintah pusat.

Transfer pemerintah pusat yaitu, sebagai berikut:

a) Dana perimbangan. Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan sendiri terdiri dari:

1. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu

APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU No. 23 2014 pasal 1 ayat 48). Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 289 Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam.

2. Dana alokasi umum. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah
3. Dana alokasi khusus. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan

prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

- b) Dana otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus (UU No.23 Tahun 2014 pasal 294 ayat 1).
- c) Dana keistimewaan. Dana keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan. (UU No.23 Tahun 2014 pasal 294 ayat 2).
- d) Dana desa. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa (UU No.23 Tahun 2014 pasal 294 ayat 3).

2) Transfer antar daerah.

Transfer antar daerah yaitu, sebagai berikut:

- a) Pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka

persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014 pasal 294 ayat 4).

- b) Bantuan keuangan. Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya (UU No. 23 Tahun 2014 pasal 294 ayat 5).

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014 pasal 295 ayat 1).

1) Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang dapat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang

diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

2. Belanja daerah

Menurut PP No. 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 27 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Fungsi belanja ini antara lain untuk pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dikelompokkan menjadi:

a. Belanja rutin (operasi)

Belanja rutin adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek . Belanja rutin (operasi) antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b. Belanja modal atau pembangunan

Belanja modal atau pembangunan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja

modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan , peralatan serta aset tidak berwujud.

c. Belanja lain-lain/ tidak terduga

Belanja lain-lain/ tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyerahan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d. Transfer keluar

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

3. Pembiayaan daerah

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 37 tentang pemerintahan daerah, Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang dimaksud penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yaitu, sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan.

Yang dimaksud sebagai penerimaan pembiayaan daerah yaitu, sebagai berikut:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 2) Pencairan dana cadangan, Pencairan dana cadangan berasal dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- 4) Penerimaan pinjaman daerah. Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- 5) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Pengeluaran pembiayaan.

Yang termasuk pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan yaitu:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- 2) Penyertaan modal daerah.
- 3) Pembentukan dana cadangan.

C. Kinerja Keuangan Daerah

1. Pengertian kinerja keuangan daerah

Kinerja Keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2012:25).

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penelitian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Halim dan Kusufi, 2012:212)

Untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

2. Tujuan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121 dalam Puput Risky Pramita 2015):

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

3. Indikator

pengukuran kinerja keuangan Mahsun (2013:196) menyebutkan lima manfaat dilakukannya pengukuran Kinerja Keuangan, yaitu :

- a. Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah infrastruktur yang ada.
- b. Indikator Proses (*Proces*), misalnya ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan layanan jasa.
- c. Indikator Keluaran (*Output*), misalnya jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- d. Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.
- e. Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya tingkat kepuasan masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat.
- f. Indikator Impact, misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

1. Pengertian analisis kinerja keuangan daerah

Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2010:87).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim dan Kusufi, 2012:230).

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah penggunaannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah akuntansi dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim dan Kusufi, 2012:232).

2. Rasio analisis kinerja keuangan daerah

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara finansial yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas PAD rasio efisiensi keuangan daerah (REKD), rasio Keserasian, rasio pertumbuhan dan berikut ini penjelasan terkait rasio-rasio tersebut yaitu, sebagai berikut :

a. Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi,2010:142).

Menurut Halim dan Kusufi (2012:232) menyatakan bahwa rasio kemandirian (otonomi fiskal) menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat, Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (0%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegasi

Sumber: *Mahsun (2012:82)*

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

b. Rasio efektivitas PAD

Menurut Halim dan Kusufi (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan,

kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dimana kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang di dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010:143). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Kriteria	Persentase
Efektif	$x > 100\%$
Efektivitas Berimbang	$x = 100\%$
Tidak Efektif	$x < 100\%$

Sumber: Mahsun (2012:187)

c. Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di

bawah 100%. Semakin kecil rasio Efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Mahsun, 2012:187). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria	Persentase
Efisien	<100%
Efisiensi Berimbang	=100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Mahsun (2012:187)

d. Rasio Keserasian

Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja

Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil Menu (Halim dan Kusufi, 2012:236)

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas dengan demikian pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja, guna menjaga anggaran tetap berjalan baik (Mahmudi, 2010:162).

1) Rasio belanja operasi (Rutin)

Rasio Belanja Operasi (Rutin) merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini memberi informasi kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010 hal.164) di dalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio belanja modal

Rasio belanja modal adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010:164). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2010:138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana

yang perlu mendapatkan perhatian (Halim dan Kusufi, 2012:241). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan.

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n.

P_0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n).

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Arthaingan H.Mutiha (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014	Analisis Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis rasio: rasio seperti derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektif pendapatan, rasio belanja langsung dibandingkan total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, serta	Dari penelitian ini disimpulkan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain, pemerintah kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun pemerintah kota Bogor masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

Lanjutan Tabel 2.4

			rasio pertumbuhan.	
2	Dian Istyaningtias (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2014	Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.	Hasil pengujian menunjukkan: Kabupaten Banyuwangi dan Kota Tegal memiliki rasio kemandirian paling tinggi. Dan Kabupaten Blora dan Kota Pekalongan paling rendah. Rasio Efektivitas, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati berada pada posisi tertinggi dan Kabupaten Tegal dan Kota Surakarta berada pada posisi terendah. Rasio Efisiensi, Kabupaten Wonosobo dan kota Magelang berada pada posisi tertinggi sedangkan Kabupaten Boyolali, dan kota Pekalongan berada pada posisi terendah. Rasio aktivitas, kabupaten Pati dan Kabupaten Demak berada pada posisi tertinggi sedangkan kabupaten Banyumas dan Kota Tegal berada pada posisi terendah. Rasio pertumbuhan, kabupaten Banjarnegara dan Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi, sedangkan Kabupaten Semarang dan Kota Surakarta berada pada posisi terendah.
3	Lazyra KS (2016)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan	Analisis Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis rasio: Rasio Kemandirian keuangan Daerah, Rasio	Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota

Lanjutan Tabel 2.4

			Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.	Medan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut, untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target.
4	Puput Risky Pramita (2015)	Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013	Analisis Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis rasio: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,82% (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar

Lanjutan Tabel 2.4

				16,68%, (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal fluktuatif (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,80%.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pikir

kerangka pikir penelitian dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan obyek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Maros, dengan mengambil data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) kabupaten Maros yang beralamat di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dimana penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2019.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif, dimana data kualitatif berupa gambaran umum tentang pemerintah kabupaten Maros, dan data kuantitatif yaitu berupa data yang dapat dihitung, data yang dapat dihitung yaitu data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maros.

2. sumber data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari badan pengelolaan keuangan Kabupaten Maros. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten Maros tahun (2013-2017).

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten Maros selama Tahun 2013 sampai tahun 2017 yang diperlukan oleh peneliti.

D. Metode Analisis

1. Rasio kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2012:232) :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat, Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:143) :

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD)

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahsun, 2012:187) :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio aktivitas (Keserasian)

a. Rasio belanja operasi

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:164) :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio belanja modal

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:164) :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio pertumbuhan

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2012:241):

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan.

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n.

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n).

E. Definisi Operasional Variabel

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran mengenai tingkat kemampuan, pencapaian sebuah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dalam satu periode. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah digunakan alat ukur dalam bentuk rasio kinerja keuangan daerah, Rasio yang umum dipakai dalam mengukur kinerja keuangan daerah, yaitu rasio

kemandirian keuangan daerah (RKKD), rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah (REKD), rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

BAB IV SEJARAH SINGKAT PERUSAHAN

A. Kabupaten Maros

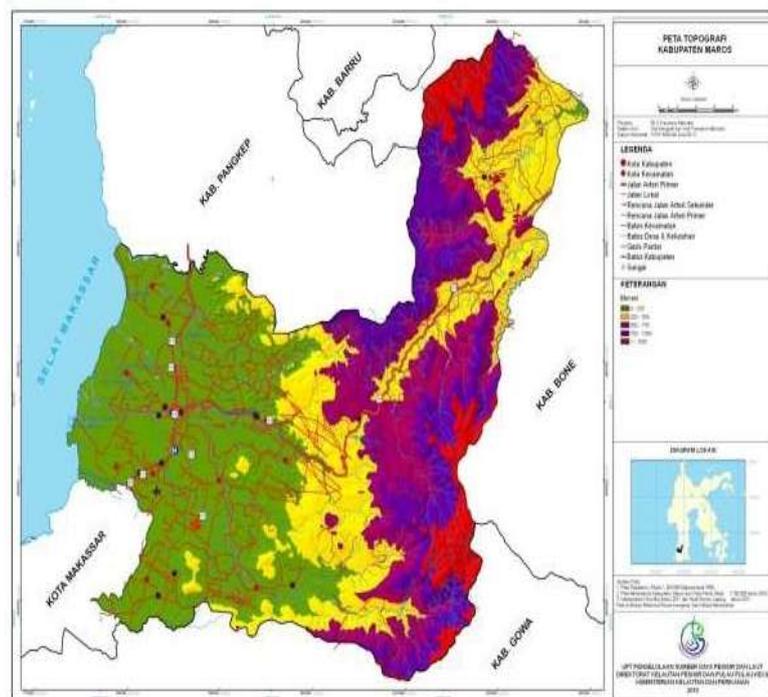
1. Letak geografis

Luas wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM² yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan. Secara geografis, kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 Desa) merupakan daerah pantai, 5% (5 Desa) adalah kawasan lembab, 27% (28 desa) adalah lereng bukit, dan 58% (60 Desa) merupakan daerah dataran. Berdasarkan topografinya sebanyak 70 desa (68%) adalah daerah datar dan 33 desa (32%) merupakan daerah yang kondisinya berbukit-bukit., serta memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 31 km. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan

yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km² dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan yaitu Mandai, Moncongloe, Maros Baru, Marusu, Turikale, Lau, Bontoa, Bantimurung, Simbang, Tanralili, Tompobulu, Camba, Cenrana, dan Mallawa.



Gambar 4.1
Wilayah Kabupaten Maros

2. Sejarah Kabupaten Maros

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat

dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu putra daerah, yakni Andi Fahry Makkasau dari bukunya berjudul “Kerajaan-Kerajaan di Maros Dalam Lintasan Sejarah”, memuat sejarah Kabupaten Maros. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan *Afdelling* Makassar yang di dalamnya tercakup Maros.

Mayoritas penduduk kabupaten Maros adalah suku Bugis. Meski demikian terdapat pula suku Makassar dan suku-suku lainnya. Hubungan antara suku terjalin hubungan yang sangat homogen, sehingga timbullah watak dan karakter khas Maros yang agamis, dinamis, kreatif, sopan dan ramah.

Berdasarkan atas ciri, identitas, latar belakang, sejarah, struktur sosial budaya yang telah berkembang berabad-abad, maka kabupaten Maros mencoba mengembangkan diri dalam penyelenggaraan pemerintah,

pembangunan maupun kemasyarakatan sebagai sub sistem dari pembangunan nasional dan merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia maka pembangunan kota menganut sepenuhnya kebutuhan yang mendesak dan aspirasi masyarakat

3. Sumber Daya Kabupaten Maros

a. Flora dan Fauna

Flora TN. Babul, merupakan jenis-jenis dari vegetasi Karts dan hutan daratan rendah. Jenis-jenis yang tumbuh pada habitat *Karts* antara lain *Planqium sp*, *Calophilum sp*, *Leea Indica*, *Sapotaceae*, *Polyalthia insignis*, *Pangium edule*, *Aleurites moluccana*, *Celastroceae*, *Cinamomum sp*, *Leea aculata*. Jenis-jenis yang tumbuh pada habitat hutan dataran rendah antara lain *Vitex cofassus* (Bitti), *Palaquium obtusifolium* (Nyato), *Pterocarpus indicus* (Cendrana), *Ficus sp* (Beringin), *Sterquila foetida*, *Dracontomelon dao* (Dao), *Dracontamelon Mangiferum*, *Arenga pinnata* (Aren), *Colona sp*, *Dillenia serrata*, *Alleurites moluccana* (Kemiri), *Diospyros celebica* (Kayu hitam), *Buchanania Arborescens*, *Antocephalus cadamba*, *Myristica sp*, *Kneam sp* dan *Calophyllum inophyllum*. Sedangkan Fauna TN. BABUL merupakan jenis yang khas dan *endemic*, antara lain Enggang Sulawesi (*Ryticeros cassidix*), Enggang Kerdil (*Peneloppides exahartus*), Musang Sulawesi (*Macrogolidia mussenbraeckii*), Kelelawar, Kera Sulawesi (*Macaca Maura*), Kuskus (*Phalanger celebencis*), Tarsius (*Tarsius sp*) dan lain lain, serta berbagai jenis kupu-kupu yakni, *Papilio blumei*, *P. Polites*, *P. Satapses*, *Troides halipron*, *T. Helena*, *T. Hypolites* dan *Graphium*

androcles. Selain itu terdapat jenis fauna yang *endemic* dalam gua sebagai penghuni gelap abadi seperti ikan dengan mata tereduksi bahkan mata buta (*Bostrychus spp*), Kumbang buta (*Eustra sp*), Jangkrik gua (*Rhaphidophora sp*) serta tungau buta (*Trombidiidae*).

b. Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Maros menurut kategori hutan dapat dibagi atas 3 jenis yakni hutan menurut fungsinya (hutan lindung, hutan produksi biasa/terbatas dan Taman Nasional). Luas total kawasan hutan di Kabupaten Maros tahun 2009 adalah 68.509 Ha, yang terdiri atas 13.994.78 Ha hutan Lindung, 17.940.88 hutan produksi biasa, 6.922.56 hutan produksi terbatas dan 29.650.79 Taman Nasional. Jenis hasil hutan yang terproduksi tiap tahunnya, seperti kayu jati, kayu bakar dan bambu mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, Ketiga jenis hasil hutan ini memiliki keterkaitan langsung dengan orientasi usaha yang berkembang di Kabupaten Maros maupun daerah sekitarnya, terutama di Kota Makassar. Kayu Jati merupakan bahan baku bagi industri *furniture*, kayu bakar memenuhi kebutuhan kegiatan masak, baik oleh penduduk maupun usaha-usaha lainnya, dan untuk bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kegiatan bangunan yang banyak dilaksanakan.

c. Pariwisata

Wilayah Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten tempat tujuan wisata di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain ; UPTD Rekreasi Bantimurung, Kolam Renang, Tempat Pra Sejarah (TPS) Leang-

Leang. Lokasi dan obyek wisata di Kabupaten Maros cukup banyak, namun ketiga obyek wisata dinilai yang memiliki jumlah pengunjung yang paling banyak dan merupakan sumber kontribusi bagi PAD. Jumlah pengunjung kolam renang mengalami penurunan sekitar 5,06% dari 3.160 orang tahun 2006 menjadi 3.000 orang pada tahun 2007. Sedangkan untuk TPS Leang-Leang Bantimurung yang merupakan obyek wisata sejarah, jumlah pengunjungnya juga mengalami penurunan sebesar 32,45% dari 8.466 orang tahun 2006 menjadi 5.719 orang tahun 2007. Untuk obyek wisata alam Bantimurung jumlah pengunjungnya mengalami kenaikan sebesar 36,48% dari 441.839 orang tahun 2006 menjadi 603.017 orang tahun 2007.

d. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal. Kabupaten Maros merupakan zona pengembangan perikanan dan kelautan di Sulawesi Selatan, selain sebagai pusat pabrik Semen Bosowa. Jika dikaji dari aspek pasar, maka beberapa komoditi yang ada di Kabupaten Maros memiliki prospek pemasaran yang relatif baik. Untuk melihat keunggulan komoditas dari segi peluang pasar, maka dapat dilakukan pengelompokan sebagai berikut;

- 1) Komoditas strategis penghasil makanan pokok yang sangat dibutuhkan dan masih perlu dipertahankan serta ditingkatkan lagi produksinya dimasa mendatang diantaranya padi sawah.

- 2) Komoditas substitusi impor yang memiliki keterkaitan dengan sektor lain terutama industri dan peternakan, dengan tingkat konsumen serta permintaan dalam negeri cukup tinggi, tetapi masih perlu mengimpor dari luar negeri.
- 3) Komoditas utama ekspor penghasil devisa disamping untuk konsumen dalam negeri, salah satu komoditas seperti ini yang telah mulai dikembangkan di Kabupaten Maros adalah sektor perikanan; misalnya udang windu, rumput laut, dan hasil laut lainnya.
- 4) Komoditas yang memiliki potensi dan pangsa pasar yang baik serta memiliki keterkaitan kuat dengan industri kecil rumah tangga berupa; kelapa dan kacang tanah, serta bahan galian C.
- 5) Komoditas eksport yang produksinya masih rendah dan perlu dipelajari peluang pengembangannya antara lain; jambu mente, kemiri, dan coklat.
- 6) Komoditas untuk pasar lokal dan regional dalam negeri, antara lain; ikan bandeng, ternak sapi, ternak ayam petelur, buras, dan pedaging.
- 7) Komoditas untuk pasaran dalam negeri yang belum banyak diusahakan atau masih memerlukan kajian mendalam, antara lain; jasa-jasa pariwisata dan pengembangan berbagai obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Maros.

e. Perikanan

Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir pantai dan laut memiliki potensi pengembangan perikanan darat dan laut yang cukup besar. Dimana

untuk saat ini jenis budidaya perikanan yang diusahakan adalah laut, sungai, tambak dan kolam. Jenis produksi yang dihasilkan terbanyak saat ini bersumber dari laut dengan produksi Tahun 2008 mencapai 20.197.93 ton. Jenis budidaya tambak yang dikembangkan di Kabupaten Maros kecuali Kecamatan Moncongloe, Simbang, Tanralili, Tompobulu, Camba, Cenrana, dan Mallawa meliputi udang dan bandeng pada luas areal pengembangan 9.653,53 Ha. Produksi terbesar dari hasil perikanan pada tambak adalah jenis ikan bandeng mencapai 3.942,00 ton yang relatif banyak diproduksi pada Kecamatan Bontoa mencapai 1.254.01 ton dan Kecamatan Marusu sebesar 1.285.08 ton. Potensi pengembangan perikanan darat cukup potensial dengan bentang pantai yang cukup panjang pada tiga kecamatan kawasan pesisir yaitu Kecamatan Maros Baru, Marusu, dan Maros Utara.

f. Perindustrian

Kondisi mengindikasikan bahwa wilayah Kabupaten Maros cukup prospek untuk investasi di sektor industrialisasi karena didukung oleh potensi sumber daya wilayah maupun sarana dan prasarana wilayah, terutama pada sektor transportasi yang dekat dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar sebagai outlet utama bagi Pulau Sulawesi maupun wilayah KTI. Kegiatan industri di Kabupaten Maros telah ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Lokasi industri umumnya berada pada jalur utama (jalan arteri) di Kabupaten

Maros dan berdasarkan RTRW Kabupaten Maros, kawasan industri ditetapkan di Kecamatan Marusu (Pa'tene).

g. Perkebunan

Perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Maros mengalami kenaikan untuk keseluruhan jenis komoditi, komoditi perkebunan yang dominan dikembangkan adalah jenis tanaman kemiri dengan jumlah produksi 4.399,8 ton.

h. Pertambangan

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Maros menurut jenis meliputi lempung, Batugamping, marmer, pasir kuarsa, oker, basal, andesit, diorit, granodiorit, trakit, batu pasir formasi camba, kerikil dan batu sungai, pasir sungai.

i. Pertanian

Jenis komoditi yang dikembangkan pada sub sektor tanaman hortikultura sayuran antara lain; petersai, cabai dan bawang merah dan hortikultura buah-buahan meliputi; mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya dan nenas

j. Peternakan

Jenis usaha peternakan yang dibudidayakan di Kabupaten Maros dibagi atas dua jenis yakni ternak besar dan kecil meliputi: sapi, kerbau, kuda, babi dan kambing, sedangkan ternak unggas adalah ternak ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik dan manila. Perkembangan

populasi ternak besar dan kecil dalam periode tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Struktur Organisasi



BUPATI MAROS,
Ir.H.M. HATTA

GAMBAR 4.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS

B. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Maros

1. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Maros

Pada tahun 2017 dan sampai sekarang Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) Di pimpin oleh H. Takdir.MM, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros terbentuk, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maros dan Peraturan Bupati Maros Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Maros merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan Keuangan Daerah secara Profesional agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang efektif, efisien, ekonomis, tertib, transparan dan bertanggung jawab. Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maros.

Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu: Badan Keuangan Daerah (BKD) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros

Adapun Kondisi sumber daya manusia aparatur Badan Keuangan Daerah Sebagai berikut ini:

- a. Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan status Kepegawaian

Tahun 2018 jumlah ASN pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros adalah 92 orang PNS yang terdiri atas laki-laki 53 orang dan perempuan 39 orang. Data ini menunjukkan bahwa jumlah ASN laki-laki lebih dominan daripada jumlah ASN perempuan.

Tabel 4.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI/APARATUR	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)		
		TAHUN 2018		
		Laki– Laki	Perempuan	jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	53	39	92
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0	0	0
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60	50	110
4	Magang	0	0	0
JUMLAH TOTAL		113	89	202

Sumber data: Subbag. Umum, Asset dan Kepegawaian, Badan Keuangan Daerah (Data olah 2018).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah Pegawai/aparatur Laki- laki lebih besar dari jumlah Pegawai/aparatur perempuan, namun perbedaannya jumlahnya 24 orang dari laki – laki dan perempuan.

- b. komposisi sumber daya manusia aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan tingkat pendidikan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros pada Tahun 2018 dengan jumlah ASN 92 orang berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
komposisi sumber daya manusia aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)		
		TAHUN 2018		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)	0	0	0
2	Strata Dua (S2)	11	2	13
3	Strata Satu (S1)	18	31	49
4	Diploma Tiga (D III)	1	1	2
5	SMA/SMK/ Sederajat	19	4	23
6	SMP Sederajat	2	0	2
7	SD Sederajat	3	0	3
JUMLAH TOTAL		54	38	92

Sumber data: Subbag. Umum, Asset dan Kepegawaian, Badan Keuangan Daerah (Data Diolah 2018)

Pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa ASN Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas : SD 3 orang, SMP 2 orang , SMA/SMU dan sederajat sebanyak 23 orang, Diploma 3 (D.III) 2 orang, Strata Satu (S.1) sebanyak 49 orang, Strata Dua (S.2) sebanyak 13 orang, Strata Tiga (S.3) tidak ada.

- c. Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)

ASN Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros menurut Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah, Berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional) Tahun 2018 terdiri dari :

Tabel 4.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)		
		TAHUN 2018		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	STRUKTURAL			
	1. ESELON II B	1	0	1
	2. ESELON III A	1	0	1
	3. ESELON III B	3	1	4
	4. ESELON IV A	9	6	15
	5. ESELON IV B	1	0	1
2	FUNGSIONAL			
	1. FUNGSIONAL TERTENTU	0	0	0
	2. FUNGSIONAL UMUM	39	31	70
	JUMLAH TOTAL	54	38	92

Sumber data: Subbag. Umum, Asset dan Kepegawaian, Badan Keuangan Daerah (Data diolah 2018).

d. Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan pangkat dan golongan

ASN Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros menurut Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2018 terdiri dari:

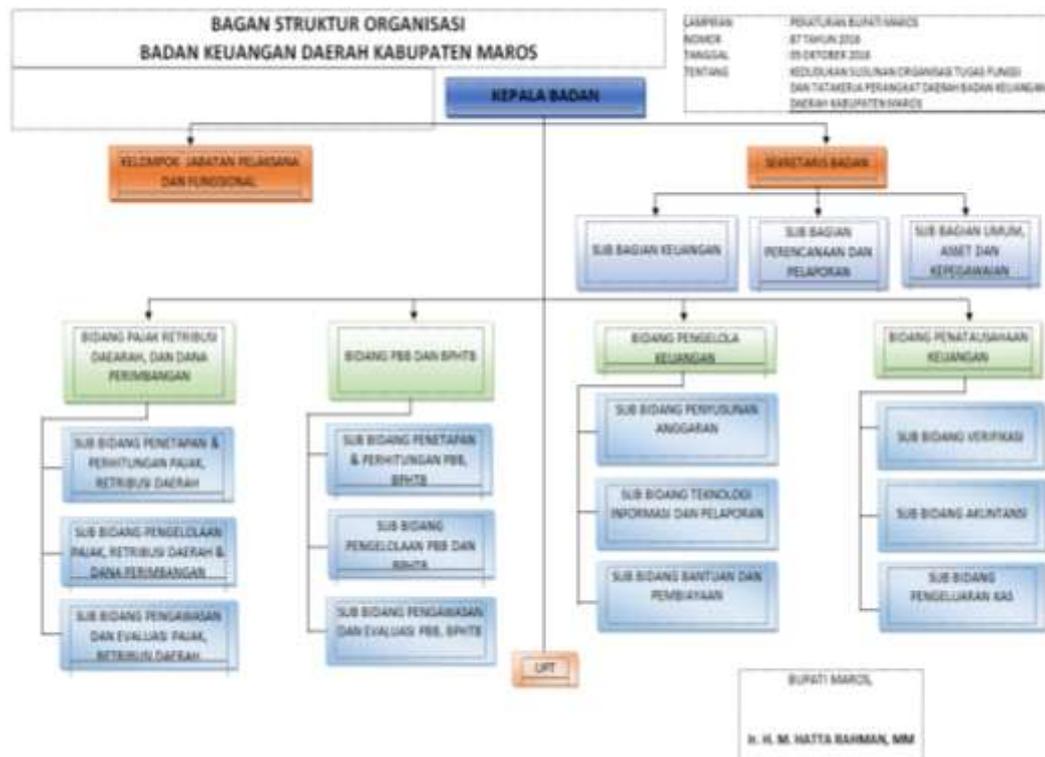
Tabel 4.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan Daerah berdasarkan pangkat dan golongan

NO	GOLONGAN DAN PANGKAT PNS	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)		
		TAHUN 2018		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	GOLONGAN I (Juru)			
	1. I A (Juru Muda)	0	0	0
	2. I B (Juru Muda Tingkat I)	1	0	1
	3. I C (Juru)	4	0	4
	4. I D (Juru Tingkat I)	0	0	0
2	GOLONGAN II (Pengatur)			
	1. II A (Pengatur Muda)	4	1	5
	2. II B (Pengatur Muda Tingkat I)	7	2	9
	3. II C (Pengatur)	8	1	9
	4. II D (Pengatur Tingkat I)	1	0	1
3	GOLONGAN III (Penata Muda)			
	1. III A (Penata Muda)	8	9	17
	2. III B (Penata Muda Tingkat I)	2	6	8
	3. III C (Penata)	10	15	25
	4. III D (Penata Tingkat I)	3	3	6
4	GOLONGAN IV (Pembina)			
	1. IV A (Pembina)	3	2	5
	2. IV B (Pembina Tingkat I)	1	0	1
	3. IV C (Pembina Utama Muda)	1	0	1
	4. IV D (Pembina Utama Madya)	0	0	0
	5. IV E (Pembina Utama)	0	0	0
JUMLAH TOTAL		53	39	92

Sumber data: Subbag. Umum, Asset dan Kepegawaian, Badan Keuangan Daerah, (Data Diolah 2018)

3. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros

Dengan adanya beberapa pendapat tersebut maka nyatalah bahwa suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dilakukan pembatasan tugas tanggung jawab dan adanya hubungan antar unsur-unsur organisasi sehingga mereka dapat bekerja sama dalam mencapai tujuannya.



Gambar 4.3
Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros

Dari gambar diatas dapat diketahui struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Maros, dan berdasarkan struktur dari pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros maka akan ada peran dan fungsi yang berbeda yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Badan bertugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan dan menentukan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan asset, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Badan.
- c. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- d. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencana dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan menyusun perencanaan dan pelaporan meliputi penyiapan, penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program kegiatan dan anggaran.
- e. Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi umum, asset dan kepegawaian, urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan , serta urusan rumah tangga.
- f. Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan. Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai beberapa sub seksi:

- 1) Subbidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah sebagaimana dipimpin oleh Kepala Subbidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan dan pengelolaan data serta evaluasi data perhitungan dan penetapan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB dan retribusi daerah.
 - 2) Subbidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan perencanaan dan pengendalian penagihan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.
 - 3) Subbidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pajak, Retribusi daerah, dan Dana Perimbangan.
- g. Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:

- 1) Subbidang Penetapan dan Perhitungan PBB, BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang Penetapan dan Perhitungan PBB, BPHTB yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan dan perhitungan PBB, BPHTB.
 - 2) Subbidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengelolaan PBB BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi Pengelolaan PBB dan BPHTB.
 - 3) Subbidang Pengawasan dan Evaluasi PBB, BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengawasan dan Evaluasi PBB, BPHTB yang bertugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB.
- h. Bidang Pengelola Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelola Keuangan bertugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman Pengelola Keuangan. Bidang Pengelola Keuangan mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:
- 1) Subbidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran bertugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelola keuangan.

- 2) Subbidang Teknologi Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang Teknologi Informasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.
 - 3) Subbidang Bantuan dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Subbidang Bantuan dan Pembiayaan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.
- i. Bidang Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman penatausahaan keuangan. Bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai beberapa sub seksi diantaranya:
- 1) Subbidang Verifikasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Verifikasi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.
 - 2) Subbidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Subbidang Akuntansi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.

- 3) Subbidang Pengeluaran Kas dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengeluaran Kas yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Data

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Maros dalam penelitian ini merupakan suatu proses penilaian terkait tingkat pencapaian dari kinerja Kabupaten Maros dalam bidang keuangan pada kurung waktu tahun 2013-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah (REKD), rasio keserasian dan rasio pertumbuhan, hasil dari kelima rasio tersebut yaitu sebagai berikut

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menurut Halim dan Kusufi (2012:232) menyatakan bahwa rasio kemandirian (otonomi fiskal) menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat, Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menunjukkan pola hubungan antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Maros

THN	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2013	79.513.862.570	782.339.597.789	10,16	Instruktif
2014	118.267.910.132	863.436.465.517	13,69	Instruktif
2015	141.487.685.605	991.527.230.592	14,26	Instruktif
2016	165.487.675.628	1.186.029.276.647	13,95	Instruktif
2017	194.999.053.694	1.043.070.030.930	18,69	Instruktif
Rata-rata			14,15	Instruktif

Sumber : Data diolah (2019)

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PAD kabupaten Maros yaitu sebesar Rp79.513.862.570, tahun 2014 Rp118.267.910.132, tahun 2015 Rp141.487.685.605, tahun 2016 Rp165.487.675.628 dan pada tahun 2017 Rp194.999.053.694.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat rasio kemandirian Pemerintah daerah kabupaten Maros untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 termasuk dalam kategori Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) dikarenakan berada dibawah 25%, dimana pada tahun 2013 menunjukkan rasio kemandirian sebesar 10,16% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 13,69% kemudian kembali meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 14,26% namun pada tahun 2016 rasio kemandirian pemerintah daerah kabupaten Maros mengalami penurunan yaitu ke angka 13,95%,

dan ditahun 2017 rasio kemandirian pemerintah daerah kabupaten Maros kembali mengalami peningkatan yaitu ke angka 18,69%.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dimana kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang di dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2
Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Maros

THN	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
2013	79.513.862.570	102.732.500.000	77,39	Tidak Efektif
2014	118.267.910.133	150.022.399.954	78,83	Tidak Efektif
2015	141.487.685.605	196.185.309.800	72,11	Tidak Efektif
2016	165.487.675.628	176.118.724.400	93,96	Tidak Efektif
2017	194.999.053.694	255.585.977.000	76,29	Tidak Efektif
Rata-rata			79,72	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat rasio efektivitas atas pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah daerah kabupaten Maros untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 termasuk dalam kategori tidak efektif dikarenakan berada dibawah 100%, dimana pada tahun 2013 menunjukkan rasio efektivitas PAD sebesar 77,39% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 78,83% kemudian menurun pada tahun 2015 yaitu sebesar 72,11% dan kembali mengalami peningkatan ke angka 93,96% pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 rasio efektivitas PAD pemerintah daerah kabupaten Maros kembali mengalami penurunan yaitu ke angka 76,29%.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio Efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) yang menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Maros

THN	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2013	Rp871.051.679.383	Rp879.546.874.920	99,03	Efisien
2014	Rp966.872.120.387	Rp996.256.583.450	97,05	Efisien
2015	Rp1.119.660.085.553	Rp1.133.946.916.198	98,74	Efisien
2016	Rp1.339.212.825.383	Rp1.374.566.925.494	97,42	Efisien
2017	Rp1.275.149.418.884	Rp1.299.767.473.996	98,10	Efisien
Rata-rata			98,07	Efisien

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 untuk realisasi belanja daerah pemerintah kabupaten Maros mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017, dan untuk tingkat realisasi pendapatan daerah pemerintah kabupaten Maros juga mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017.

Sedangkan berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017 dikategorikan efisien karena berada dibawah 100%, dimana pada tahun 2013 menunjukkan Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) sebesar 99,03% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 97,05% kemudian meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 98,74% dan kembali mengalami penurunan ke angka 97,42% pada tahun 2016, namun pada

tahun 2017 rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) pemerintah daerah kabupaten Maros kembali mengalami peningkatan yaitu ke angka 98,10%.

4. Rasio Keserasian

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas dengan demikian pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja, guna menjaga anggaran tetap berjalan baik (Mahmudi, 2010:162).

Untuk mengetahui persentase antara belanja operasi dan belanja modal maka digunakan dua alat analisis yaitu sebagai berikut :

1) Rasio belanja operasi (Rutin)

Menurut Mahmudi (2010 hal.164) di dalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio belanja modal

Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010:164). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4
Rasio Keserasian Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

THN	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	R.B Operasi (%)	R.B Modal (%)
2013	595.593.945.073	259.777.474.954	871.051.679.383	68,37	29,82
2014	648.680.446.262	297.822.399.349	966.872.120.387	67,09	30,80
2015	749.871.597.251	325.693.298.837	1.119.660.085.553	66,97	29,08
2016	811.342.410.184	422.440.251.452	1.339.212.825.383	60,58	31,54
2017	799.817.993.564	359.172.375.516	1.275.149.418.884	62,72	28,15
Rata-rata				65,14	29,88

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat tingkat keserasian belanja pemerintah daerah kabupaten maros berdasarkan dari hasil rasio belanja operasi dan rasio belanja modal pemerintah daerah kabupaten Maros yaitu dimana pada tahun 2013 rasio belanja operasi senilai 68,37 dan rasio belanja modal sebesar 29,82, pada tahun 2014 rasio belanja operasi senilai 67,09 dan rasio belanja modal sebesar 30,80, pada tahun 2015 rasio belanja operasi senilai 68,37 dan rasio belanja modal sebesar 29,08, pada tahun 2016 rasio belanja operasi senilai 60,58 dan rasio belanja modal sebesar 31,54, dan kemudian pada tahun 2017 rasio belanja operasi senilai 62,72 dan rasio belanja modal sebesar 28,15.

Melalui tabel 5.4 juga dapat dilihat bahwa tingkat belanja modal pemerintah daerah kabupaten Maros termasuk cukup tinggi karena nilai

dari rasio belanja modal pemerintah daerah kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai tahun 2017 diatas 20%, dimana nilai terendah ada pada tahun 2015 dengan nilai 29,08% dan nilai tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,54%

5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2010:138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim dan Kusufi, 2012:241). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan.

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n.

P_0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n).

Berdasarkan rumus yang digunakan, rasio pertumbuhan menghitung empat aspek penting dalam menilai kinerja keuangan yaitu total pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja operasi. Berikut ini hasil perhitungan rasio pertumbuhan dari empat aspek tersebut :

Tabel 5.5
Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Daerah (Rp)	879.546.874.920	996.256.583.450	1.133.946.916.198	1.374.566.925.494	1.299.787.473.996
Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%)	-	0,132	0,138	0,212	-0,054
PAD (Rp)	79.513.862.570	118.267.910.132	141.487.685.605	165.487.675.628	194.999.053.694
Pertumbuhan PAD (%)	-	0,487	0,196	0,196	0,178
Belanja Operasi (Rp)	595.593.945.073	648.680.446.262	749.871.597.251	811.342.410.184	799.817.993.564
Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	-	0,089	0,155	0,081	-0,014
Belanja Modal (Rp)	259.777.474.954	297.822.399.349	325.693.298.837	422.440.251.452	359.172.375.516
Pertumbuhan Belanja Modal (%)	-	0,146	0,093	0,297	-0,149

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah kabupaten Maros dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,132%, tahun 2015 meningkat sebesar 0,138%, tahun 2016

meningkat sebesar 0,212%, dan pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami pertumbuhan secara negatif sebesar -0,054%.

Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Maros dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,48, tahun 2015 meningkat sebesar 0,196%, tahun 2016 meningkat sebesar 0,169%, dan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,178%.

Tingkat pertumbuhan belanja operasi kabupaten Maros dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,089%, tahun 2015 meningkat sebesar 0,155%, 2016 meningkat sebesar 0,081%, dan tahun 2017 mengalami pertumbuhan secara negatif yaitu sebesar -0,014%.

Tingkat pertumbuhan belanja modal kabupaten Maros dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,146%, tahun 2015 meningkat sebesar 0,093%, tahun 2016 meningkat sebesar 0,297%, dan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan secara negatif yaitu sebesar -0,149%

B. Pembahasan

1. Rasio Kemandirian

Pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa pendapatan transfer Kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai pada tahun 2016 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 pendapatan transfer kabupaten Maros yaitu sebesar Rp 782.339.597.789, tahun 2014 Rp 863.436.465.517, tahun 2015 Rp 991.527.230.592, tahun 2016 Rp1.186.029.276.647 dan pada tahun 2017 pendapatan transfer kabupaten Maros mengalami penurunan yaitu dengan nilai Rp1.043.070.030.930.

Sedangkan pada tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 PAD kabupaten Maros sebesar Rp79.513.862.570, tahun 2014 Rp118.267.910.132, tahun 2015 Rp141.487.685.605, tahun 2016 Rp165.487.675.628 dan pada tahun 2017 Rp194.999.053.694.

Setelah melakukan perhitungan terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten Maros tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan rasio kemandirian dapat diketahui bahwa pemerintah daerah kabupaten Maros termasuk dalam kategori Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) dikarenakan berada dibawah 25%, dimana pada tahun 2013 menunjukkan rasio kemandirian sebesar 10,16% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 13,69% kemudian kembali meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 14,26% namun pada tahun 2016 rasio kemandirian pemerintah daerah kabupaten Maros mengalami penurunan yaitu ke angka 13,95%, dan ditahun 2017 rasio kemandirian pemerintah daerah kabupaten Maros kembali mengalami peningkatan yaitu ke angka 18,69%.

2. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa target PAD pemerintah daerah kabupaten Maros tahun 2013 sampai tahun 2017 bertumbuh

secara *fluktuatif* yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 target PAD kabupaten Maros meningkat yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp.102.732.500.000, tahun 2014 Rp.150.022.399.954, tahun 2015 Rp.196.185.309.800, kemudian di tahun 2016 target PAD pemerintah daerah kabupaten Maros mengalami penurunan sebesar Rp1.176.118.724.400 dan pada tahun 2017 target PAD pemerintah daerah kabupaten Maros kembali meningkat yaitu dengan nilai Rp.255.585.977.000.

Sedangkan realisasi PAD Kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PAD kabupaten Maros yaitu sebesar Rp79.513.862.570, tahun 2014 Rp118.267.910.132, tahun 2015 Rp141.487.685.605, tahun 2016 Rp165.487.675.628 dan pada tahun 2017 Rp194.999.053.694.

Setelah melakukan perhitungan rasio efektivitas atas pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah daerah kabupaten Maros untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 termasuk dalam kategori tidak efektif dikarenakan berada dibawah 100%, dimana pada tahun 2013 menunjukan rasio efektivitas PAD sebesar 77,39% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 78,83% kemudian menurun pada tahun 2015 yaitu sebesar 72,11% dan kembali mengalami peningkatan ke angka 93,96% pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 rasio efektivitas PAD pemerintah daerah kabupaten Maros kembali mengalami penurunan yaitu ke angka 76,29%.

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa kemampuan pemerintah daerah kabupaten Maros dalam merealisasi anggaran pendapatan daerahnya termasuk tidak efektif dengan pertumbuhan yang bersifat *fluktuatif*, hal ini menandakan kinerja kabupaten Maros dalam merealisasikan anggaran PAD kurang baik dan tidak konsisten.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 5.3 untuk realisasi belanja daerah pemerintah kabupaten Maros mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017, dan untuk tingkat realisasi pendapatan daerah pemerintah kabupaten Maros juga mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017.

Sedangkan berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017 dikategorikan efisien karena berada dibawah 100%, dimana pada tahun 2013 menunjukan Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) sebesar 99,03% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 97,05% kemudian meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 98,74% dan kembali mengalami penurunan ke angka 97,42% pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) pemerintah daerah kabupaten Maros kembali mengalami peningkatan yaitu ke angka 98,10%.

Dari urian sebelumnya dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintahan daerah kabupaten Maros dalam memperoleh pendapatan dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017 dikategorikan efisien dengan pertumbuhan yang bersifat *fluktuatif*, hal ini menandakan kinerja kabupaten Maros dalam memperoleh pendapatan pada lima tahun terakhir cukup baik tetapi bersifat tidak konsisten.

4. Rasio Keserasian

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas dengan demikian pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja, guna menjaga anggaran tetap berjalan baik, dalam mengetahui persentase belanja operasi dan belanja modal digunakan alat analisis yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui hasil dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal pemerintah daerah kabupaten Maros yaitu dimana pada tahun 2013 rasio belanja operasi senilai 68,37 dan rasio belanja modal sebesar 29,82, pada tahun 2014 rasio belanja operasi senilai 67,09 dan rasio belanja modal sebesar 30,80, pada tahun 2015 rasio belanja operasi senilai 68,37 dan rasio belanja modal sebesar 29,08, pada tahun 2016 rasio belanja operasi senilai 60,58 dan rasio belanja modal sebesar 31,54, dan kemudian pada tahun 2017 rasio belanja operasi senilai 62,72 dan rasio belanja modal sebesar 28,15.

Melalui tabel 5.4 juga dapat dilihat bahwa tingkat belanja modal pemerintah daerah kabupaten Maros termasuk cukup tinggi karena nilai dari rasio belanja modal pemerintah daerah kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai tahun 2017 diatas 20%, dimana nilai terendah ada pada tahun 2015 dengan nilai 29,08% dan nilai tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,54%, hal ini menandakan dalam lima tahun terakhir belanja pemerintah daerah kabupaten Maros yang bersifat menambah aset daerah atau yang bersifat jangka panjang tergolong cukup tinggi.

5. Rasio Pertumbuhan

Dengan menggunakan rasio pertumbuhan dapat diketahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Rasio pertumbuhan menghitung empat aspek penting dalam menilai kinerja keuangan yaitu total pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja operasi, berikut ini hasil rasio pertumbuhan pemerintah daerah kabupaten Maros berdasarkan empat aspek penting tersebut:

- a. Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah kabupaten Maros dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar

0,132%, tahun 2015 meningkat sebesar 0,138%, tahun 2016 meningkat sebesar 0,212%, dan pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami pertumbuhan secara negatif sebesar -0,054%. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui kinerja pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah daerah kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang positif namun pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan secara negatif hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) .

- b. Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Maros dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,487, tahun 2015 meningkat sebesar 0,196%, tahun 2016 meningkat sebesar 0,169%, dan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,178%. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui kinerja pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang positif namun jika berdasarkan nilai rasio tersebut terjadi penurunan kinerja dari tahun 2013 sampai tahun 2017.
- c. pertumbuhan belanja operasi kabupaten Maros dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,089%, tahun 2015 meningkat sebesar 0,155%, 2016 meningkat sebesar 0,081%, dan tahun 2017 mengalami pertumbuhan secara negatif yaitu sebesar -0,014%. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui kinerja pertumbuhan belanja operasi

pemerintah daerah kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang positif namun bersifat *fluktuatif* sedangkan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan secara negatif.

- d. Tingkat pertumbuhan belanja modal kabupaten Maros dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,146%, tahun 2015 meningkat sebesar 0,093%, tahun 2016 meningkat sebesar 0,297%, dan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan secara negatif yaitu sebesar -0,149%. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui kinerja pertumbuhan belanja modal pemerintah daerah kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang positif namun bersifat *fluktuatif* sedangkan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan secara negatif.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Maros periode dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan menggunakan lima rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Maros termasuk baik. Kinerja yang baik dapat dilihat dari tingkat rasio efisiensi keuangan daerah yang termasuk kategori efisien, belanja modal pemerintah daerah kabupaten Maros yang termasuk tinggi serta rasio pertumbuhan keuangan daerah yang menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun terjadi penurunan pendapatan daerah pada tahun 2017 yang disebabkan pengurangan anggaran Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat serta rasio kemandirian yang menunjukkan pola hubungan *instruktif*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

Pemerintah daerah kabupaten Maros diharapkan mampu lebih mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber-sumber PAD yang ada sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pusat dapat diminimalisir. Serta dengan mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber-sumber PAD juga

dapat meningkatkan efektivitas dalam usaha pemerintah daerah kabupaten Maros merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya sehingga hasil penelitian benar-benar bisa dijadikan tolak ukur dan bahan evaluasi bagi pihak pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Arthaingan, H.Mutiha. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014*. Jurnal: Laboratorium Akuntansi, Program Vokasi Universitas Indonesia.
- Halim, A dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Istyaningtias, Dian. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2014*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- KS, Lazyra. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Pramita, Puput Risky. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah No. 55. Tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan*. Jakarta.

LAMPIRAN



KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

NAMA MAHASISWA : MUH. HAERIL ARIF
NIM : 1560302019
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS
PEMBIMBING I : H. AHMAD YUSDARWIN WAWORUNTU, SE., MM
PEMBIMBING II : ZAINAL ABIDIN, SE., M.Si

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	06/05/19	Bab I - II	
2	10/05/19	Bab III	
3	25/05/19	Bab IV	
4	15/06/19	perbaikan yg kuma	
5	17/06/19	Bab I - II	
6	20/06/17	Bab - IV	
7	25/06/17	Bab - V	

8			↳.
9			↳.
10.	12/07/19	ACC 12/07 - 19.	↳.

Mengetahui,
Kaprodi Manajemen,

Nur Pratiwi, SE., M. Sc.

BUKTI PENYETORAN

No. /PERPUS-UMMA/ /2019

Saya mahasiswa FKIP, **FEB** FAPERTAHT, telah menyerahkan Buku / Proposal / Tugas Akhir / Laporan / Skripsi;

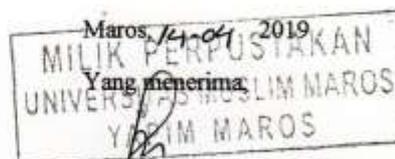
Nama : MUH. HAERIL ARIF

Nim : 1560302029

Jurusan / Prodi : FEB / MANAJEMEN KEUANGAN

Judul : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KAB MAROS

Jumlah : 1 Eksamplar



Abdul Rahman, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
 email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 135/IV/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 134/IV/REK-IP/DPMPTSP/2019

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : MUH. HAERIL ARIF
 Nomor Pokok : 1560302029
 Tempat/Tgl.Lahir : MAKASSAR / 16 Maret 1994
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : LINGKUNGA BINTO CINA KELURAHAN RAYA, MAROS
 Tempat Meneliti : BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KAB.MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS"

Lamanya Penelitian : 15 April 2019 s/d 01 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 15 April 2019

KEPALA DINAS,



ANDI KOSMAN, S. Sos, MM

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 19721108 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Maros Prov. Sulawesi Selatan Telp. (0411)371005 Kode Pos 90511
 e-mail: dpkd@maroskab.go.id website : bpkd@maroskab.go.id

Maros, 22 April 2019

Nomor : 070/ 307- / IV/2019
 Lampiran :
 Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muslim Maros
 Di - **MAROS**

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Maros Nomor : 135/IV/IP/DPMPTSP/2019, Tanggal 15 April 2019, Permohonan Izin Penelitian, menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAERIL ARIF**
 Tempat / Tgl. Lahir : Makassar, 16 Maret 1994
 Alamat : Lingkungan, Bonto Cina, Kelurahan Raya Maros
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nomor Pokok : 1560302029

Bahwa maksud surat tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari Badan Keuangan Daerah Kab. Maros untuk melakukan Penelitian dan pengambilan data, guna menyusun Skripsi dengan judul :

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS ” Yang dilaksanakan pada Tanggal 15 April s/d 01 Juni 2019

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN



L. H. TAKDIR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. : 19671201 199703 1 004

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No.62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018
 e-mail : lppmummayapimmaros@gmail.com, Kode Pos 90511
 Kampus 2 : Jalan Kokoa – Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 57/LPPM-UMMA/IV/2019
 Lampiran : 1 (satu) exemplar
 Perihal : **Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada yang terhormat:

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Maros

Di
 Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat

Dalam rangka penyelesaian studi akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros (FEB-UMMA) tahun akademik 2018/2019, maka kami mohon kiranya bapak dapat memberikan rekomendasi izin penelitian kepada mahasiswa kami.

Adapun data diri mahasiswa tersebut yaitu:

NAMA	: Muh Haeril Arif
NIM	: 1560302029
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Manajemen Keuangan/S1
Lokasi Penelitian	: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Maros.
Judul Penelitian	: Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Maros, 11 April 2019
 Ketua LPPM-UMMA,


Dr. Hj. Suhartina R., M. Hum.
 NIDN: 0914017001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Biro Administrasi Akademik
2. Dekan FEB UMMA
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal File,-

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 62 Maros Telepon (0411) 372161

TRANSKRIP NILAI

Nama Lengkap : **MUH. HAERIL ARIF**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 16 Maret 1994
 Nomor Induk Mahasiswa : **1560302029**
 Program Pendidikan : STRATA SATU (S.1)
 Bidang Ilmu : E K O N O M I
 Jurusan / Program Studi : MANAJEMEN / MANAJEMEN
 Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN

NO.	MATA KULIAH	HM	AM	K	M
1	Studi Islam 1	A	4	2	8
2	Bahasa Indonesia	A	4	2	8
3	Pengantar Bisnis	A	4	3	12
4	Bahasa Inggris	A	4	2	8
5	Statistik I	B	3	3	9
6	Pengantar Akuntansi	A	4	3	12
7	Teori Ekonomi Mikro	A	4	2	8
8	Ekonomi Moneter	B	3	2	6
9	Studi Islam 2	A	4	2	8
10	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	B	3	3	9
11	Pengantar Manajemen	A	4	3	12
12	Bahasa Inggris Bisnis	A	4	2	8
13	Teori Ekonomi Makro	A	4	2	8
14	Aspek Hukum Dalam Bisnis	A	4	2	8
15	Matematika Keuangan	A	4	2	8
16	Akuntansi Biaya	A	4	2	8
17	Studi Islam 3	A	4	2	8
18	Matematika Ekonomi	A	4	3	12
19	Pengantar Aplikasi Komputer	B	3	3	9
20	Keuangan Daerah	A	4	2	8
21	Manajemen Sumber Daya Manusia	A	4	3	12
22	Manajemen Pemasaran	A	4	3	12
23	Pengantar Ekonomi Pembangunan	B	3	3	9
24	Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	B	3	3	9
25	Studi Islam 4	A	4	2	8
26	Statistik II / Statistik Bisnis	A	4	3	12
27	Manajemen Keuangan	B	3	3	9
28	Manajemen Operasional	B	3	2	6
29	Sistem Informasi Manajemen	C	2	3	6
30	Perilaku Keorganisasian	A	4	2	8
31	Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil	A	4	3	12
32	Perekonomian Indonesia	A	4	3	12
33	Studi Islam 5	A	4	2	8
34	Manajemen Risiko	A	4	3	12
35	Metodologi Penelitian	A	4	3	12

36	Ekonomi Internasional	B	3	3	9
37	Manajemen Keuangan Lanjutan (KU)	B	3	3	9
38	Perpajakan	A	4	2	8
39	Kewirausahaan	A	4	3	12
40	Pasar Uang dan Modal (KU)	A	4	3	12
41	Studi Islam 6	A	4	2	8
42	Operation Research	A	4	3	12
43	Penganggaran / Budgeting Perusahaan	A	4	3	12
44	Akuntansi Manajemen	A	4	3	12
45	Studi Kelayakan Bisnis	A	4	2	8
46	Ekonomi Manajerial	B	3	3	9
47	Manajemen Strategi	A	4	3	12
48	Analisa Laporan Keuangan (KU)	A	4	3	12
49	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A	4	4	16
50	STUDI ISLAM 7	B	3	2	6
51	MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL	A	4	3	12
52	SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN	A	4	3	12
53	STUDI ISLAM 8	B	3	2	6
54	SKRIPSI	A	4	6	24
Jumlah			:	144	535
Nilai Mutu Rata-Rata			:	3,72	

Maros, 20 Agustus 2019

Dekan,

Dr. Dahlan, S.E., M.M.

NIDN: 0931125807



URAIAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN			KET
	2013			
	TARGET	REALISASI	%	
PENDAPATAN	920.121.245.914,00	879.546.874.920,47	95,59	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.732.500.000,00	79.513.862.570,72	77,40	
Pajak Daerah	46.399.000.000,00	42.059.791.208,00	90,65	
Retribusi Daerah	27.751.000.000,00	26.720.832.395,26	96,29	
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00	2.708.899.876,00	60,20	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	24.082.500.000,00	8.024.339.091,46	33,32	
PENDAPATAN TRANSFER	783.337.427.354,00	782.339.597.789,75	99,87	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	624.604.905.354,00	626.203.965.763,00	100,26	
Bagi Hasil Pajak	31.659.719.538,00	33.352.871.864,00	105,35	
Bagi Hasil Bukan Pajak	1.356.353.816,00	1.262.261.899,00	93,06	
Dana Alokasi Umum	540.383.322.000,00	540.383.322.000,00	100,00	
Dana Alokasi Khusus	51.205.510.000,00	51.205.510.000,00	100,00	
Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya	129.101.922.000,00	125.798.922.000,00	97,44	
Dana Penyesuaian	129.101.922.000,00	125.798.922.000,00	97,44	
Transfer Pemerintah Provinsi	29.630.600.000,00	30.336.710.026,75	102,38	
Bagi Hasil Pajak	29.630.600.000,00	30.336.710.026,75	102,38	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.051.318.560,00	17.693.414.560,00	51,96	
Pendapatan Hibah	12.000.000.000,00	-	-	
Bantuan Keuangan dari Provinsi	22.051.318.560,00	17.693.414.560,00	80,24	
BELANJA DAERAH	929.246.171.956,00	871.051.679.383,00	93,74	
BELANJA OPERASI	632.565.408.141,00	595.593.945.073,00	94,16	
Belanja Pegawai	474.671.093.398,00	465.233.058.282,00	98,01	
Belanja Barang dan Jasa	149.811.514.743,00	124.537.117.434,00	83,13	
Belanja Bunga	500.000.000,00	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	5.057.800.000,00	3.431.260.750,00	67,84	
Belanja Bantuan Sosial	2.525.000.000,00	2.392.508.607,00	94,75	
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	
BELANJA MODAL	280.180.763.815,00	259.777.474.954,00	92,72	
Tanah	4.417.385.000,00	2.740.586.000,00	62,04	
Peralatan dan Mesin	40.458.813.004,00	36.918.273.050,00	91,25	
Bangunan dan Gedung	105.531.344.020,00	94.848.747.576,00	89,88	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.217.402.891,00	121.234.940.778,00	96,82	
Aset Tetap Lainnya	1.411.692.000,00	996.669.000,00	70,60	
Aset Lainnya	3.144.126.900,00	3.038.258.550,00	96,63	
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	680.560.000,00	45,37	
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	680.560.000,00	45,37	
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	15.000.000.000,00	14.999.699.356,00	100,00	
Bantuan Keuangan	15.000.000.000,00	14.999.699.356,00	100,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(9.124.926.042,00)	8.495.195.537,47	(93,10)	
PEMBIAYAAN	9.124.926.042,00	(2.158.624.183,63)	(23,66)	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	46.624.926.042,00	20.039.600.626,37	42,98	
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	20.039.600.626,37	20.039.600.626,37	100,00	
PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	26.585.325.415,63	-	-	
PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.500.000.000,00	22.198.224.810,00	59,20	
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	9.500.000.000,00	7.760.080.000,00	81,69	
PEMBIAYAAN POKOK UTANG	28.000.000.000,00	14.438.144.810,00	51,56	
PEMBIAYAAN NETTO	9.124.926.042,00	(2.158.624.183,63)	(23,66)	
SILPA TAHUN BERKENAAN	-	6.336.571.353,84		

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(AUDITED)

NO.	URAIAN	REF	2014		%	(dalam Rupiah)	
			ANGGARAN	REALISASI		2013	REALISASI
1	PENDAPATAN	V.B.1					
2							
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.B.1.a					
4	Pendapatan Pajak Daerah	V.B.1.a.1)	99.199.000.000,00	57.503.299.794,00	97,14	42.059.791.208,00	
5	Pendapatan Retribusi Daerah	V.B.1.a.2)	48.418.264.954,00	40.438.066.771,99	83,52	26.720.832.395,26	
6	Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan/daerah yang Dipisahkan	V.B.1.a.3)	5.000.000.000,00	3.677.383.952,00	73,55	2.711.181.876,00	
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.B.1.a.4)	37.405.135.000,00	16.649.169.644,71	44,51	8.022.057.091,46	
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		190.022.398.954,00	118.267.910.132,70	78,80	79.515.862.570,72	
9							
10	PENDAPATAN TRANSFER	V.B.1.b					
11	Transfer Pemerintah Pusat - Dana						
12	Dana Bagi Hasil Pajak	V.B.1.b.1)	17.267.841.176,00	17.934.033.736,00	103,86	33.352.871.894,00	
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.B.1.b.2)	3.817.104.562,00	2.947.670.357,00	77,22	1.262.261.899,00	
14	Dana Alokasi Umum	V.B.1.b.3)	614.998.482.000,00	614.998.482.000,00	100,00	540.383.322.000,00	
15	Dana Alokasi Khusus	V.B.1.b.4)	78.426.630.000,00	78.426.630.000,00	100,00	81.206.510.000,00	
16	Jumlah Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		714.110.067.738,00	713.906.816.093,00	99,97	626.203.965.765,00	
17							
18	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya						
19	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Dana Persewaan	V.B.1.b.5)	106.786.878.000,00	106.786.878.000,00	100,00	125.798.822.000,00	
21	Jumlah Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat - Lainnya		106.786.878.000,00	106.786.878.000,00	100,00	125.798.822.000,00	
22							
23	Transfer Pemerintah Provinsi						
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.B.1.b.6)	38.130.600.000,00	42.762.771.524,25	112,15	30.336.710.026,75	
25	Pendapatan Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Jumlah Pendapatan Transfer - Pemerintah Provinsi		38.130.600.000,00	42.762.771.524,25	112,15	30.336.710.026,75	
27							
28	Jumlah Pendapatan Transfer		868.007.535.738,00	863.436.465.617,25	100,62	782.339.597.789,75	
29							
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.B.1.c					
31	Pendapatan Hibah		12.000.000.000,00	1.068.000.000,00	8,90	0,00	
32	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Pendapatan Lainnya		22.500.000.000,00	13.464.207.700,00	59,83	17.893.414.560,00	
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		34.500.000.000,00	14.552.207.700,00	42,19	17.893.414.560,00	
35							
36	JUMLAH PENDAPATAN		1.043.529.936.892,00	896.286.603.449,95	86,47	879.548.074.920,47	
37							
38	BELANJA	V.B.2					
39	BELANJA OPERASI	V.B.2.a					
40	Belanja Pegawai	V.B.2.a.1)	481.721.246.972,00	460.755.017.243,00	95,65	485.233.058.282,00	
41	Belanja Barang dan Jasa	V.B.2.a.2)	199.506.408.814,84	159.905.796.295,00	80,15	124.537.117.434,00	
42	Bunga	V.B.2.a.3)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	Subsidi	V.B.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Hibah	V.B.2.a.5)	31.510.251.000,00	24.222.134.502,00	76,87	3.431.260.750,00	
45	Bantuan Sosial	V.B.2.a.6)	5.010.605.000,00	3.797.498.222,00	75,79	2.362.508.607,00	
46	Jumlah Belanja Operasi		717.948.613.786,84	648.680.448.262,00	90,35	595.583.945.073,00	
47							
48	BELANJA MODAL	V.B.2.b					
49	Belanja Tanah	V.B.2.b.1)	4.322.759.207,00	3.859.381.762,00	89,28	2.740.586.000,00	
50	Belanja Peralatan dan Mesin	V.B.2.b.2)	52.984.194.354,00	46.956.230.460,00	88,62	36.918.273.050,00	
51	Belanja Bangunan dan Gedung	V.B.2.b.3)	119.181.136.255,00	113.049.272.080,00	94,88	94.849.747.576,00	
52	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.B.2.b.4)	133.913.021.268,00	130.424.943.817,00	97,40	121.234.940.778,00	
53	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.B.2.b.5)	4.171.836.000,00	745.770.000,00	17,88	966.669.000,00	
54	Belanja Aset Lainnya	V.B.2.b.6)	4.217.869.176,00	2.708.801.230,00	64,07	3.038.258.550,00	
55	Jumlah Belanja Modal		318.790.617.260,00	297.822.399.549,00	93,42	269.777.474.954,00	
56							
57	BELANJA TIDAK TERDUGA	V.B.2.c					
58	Belanja Tidak Terduga		1.051.025.000,00	372.850.000,00	35,46	860.580.000,00	
59	Jumlah Belanja Tidak Terduga		1.051.025.000,00	372.850.000,00	35,46	860.580.000,00	
60							
61	JUMLAH BELANJA		1.037.790.066.046,84	946.875.486.611,00	91,24	866.051.980.027,00	
62							
63	TRANSFER						
64	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	V.B.2.d					
65	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Bantuan Keuangan		20.000.000.000,00	19.999.624.776,00	99,99	14.999.699.356,00	
68	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa		20.000.000.000,00	19.999.624.776,00	99,99	14.999.699.356,00	
69							
70	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.057.790.066.046,84	966.875.120.387,00	91,40	871.051.679.383,00	
71							
72	SURPLUS / (DEFISIT)		-14.260.120.354,84	29.394.463.062,95	-206,06	8.495.196.537,47	

NO.	URAIAN	REF	2014		%	2013
			ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
73	PEMBIAYAAN	V.B.3				
74						
75						
76	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.B.3.a				
77	Penggunaan SLPA	V.B.3.a.1)	6.336.571.353,84	6.336.571.353,84	100,00	20.039.600.626,37
78	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	V.B.3.a.2)	38.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
80	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penerimaan Pinang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Penerimaan Pinjaman Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
83						
84	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		44.336.571.353,84	6.336.571.353,84	14,29	20.039.600.626,37
85						
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.B.3.b				
87	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Penyertaan Modal (Investasi)	V.B.3.b.1)	9.000.000.000,00	7.500.000.000,00	83,33	7.780.080.000,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	V.B.3.b.2)	21.076.450.999,00	8.716.086.487,00	41,35	14.438.144.810,00
101						
102	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		30.076.450.999,00	16.216.086.487,00	53,92	22.198.224.810,00
103						
104	PEMBIAYAAN NETTO		14.260.120.354,84	-8.879.625.133,16	-69,26	-2.158.624.183,63
105	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	19.564.937.929,79		6.336.571.353,84

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Turikale, 17 Maret 2015
Bupati Maros,

Ir.H.M. Hatta Rahman, MM.

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	Anggaran 2015	Realisasi 2015 (Audited)	(%)	Realisasi 2014
1	PENDAPATAN	V.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.1.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.1.1.a.1)	68.301.000.000,00	Rp 64.996.605.475,05	95,02	57.503.299.764,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.1.1.a.2)	68.000.000.000,00	Rp 30.622.503.170,00	73,71	40.438.066.771,99
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.1.1.a.3)	6.500.000.000,00	Rp 6.267.571.043,98	96,42	3.677.383.952,00
6	Lain-lain PAD yang sah	V.1.1.a.4)	52.703.500.000,00	Rp 13.699.005.007,54	37,38	16.649.159.644,71
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		196.185.309.800,00	141.487.685.605,45	72,12	118.267.910.132,70
9	PENDAPATAN TRANSFER	V.1.1.b				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	V.1.1.b.1)	22.774.498.000,00	Rp 17.341.562.150,00	76,14	17.934.033.736,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.1.1.b.2)	2.812.473.000,00	Rp 1.840.245.234,00	65,43	2.947.670.357,00
13	Dana Alokasi Umum	V.1.1.b.3)	645.209.768.000,00	Rp 645.209.768.000,00	100,00	614.598.482.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	V.1.1.b.4)	95.399.036.000,00	Rp 95.401.330.000,00	100,00	78.426.630.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		766.195.799.000,00	759.792.905.384,00	99,16	713.906.816.093,00
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	Rp 0,00		0,00
19	Dana Penyesuaian	V.1.1.b.5)	149.285.757.000,00	Rp 149.285.757.000,00	100,00	106.766.878.000,00
20	Dana Desa	V.1.1.b.6)	23.469.704.000,00	Rp 23.469.704.000,00	100,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		172.755.461.000,00	172.755.461.000,00	100,00	106.766.878.000,00
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.1.1.b.7)	55.480.768.815,00	Rp 51.388.884.608,40	92,62	42.762.771.524,25
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.1.1.b.8)	12.575.408.000,00	Rp 7.589.979.600,00	55,91	0,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		69.056.176.815,00	58.978.864.208,40	85,41	42.762.771.524,25
27	Total Pendapatan Transfer		1.008.007.406.815,00	991.527.230.592,40	98,37	863.436.465.617,25
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
30	Pendapatan Hibah	V.1.1.c	10.000.000.000,00	Rp 932.000.000,00	9,32	1.068.000.000,00
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	Rp 0,00		0,00
32	Pendapatan Lainnya		0,00	Rp 0,00		13.484.207.700,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		10.000.000.000,00	932.000.000,00	9,32	14.552.207.700,00
34	JUMLAH PENDAPATAN		1.214.192.716.615,00	1.133.946.916.197,85	93,39	996.256.583.449,95
36	BELANJA	V.1.2				
37	BELANJA OPERASI	V.1.2.a				
38	Belanja Pegawai	V.1.2.a.1)	521.820.082.353,00	Rp 527.259.136.234,00	99,14	460.755.017.343,00
39	Belanja Barang Jasa	V.1.2.a.2)	214.456.656.903,00	Rp 165.115.313.144,00	76,99	159.905.796.295,00
40	Bunga	V.1.2.a.3)	0,00	Rp 0,00		0,00
41	Subsidi		0,00	Rp 0,00		0,00
42	Hibah	V.1.2.a.4)	60.901.476.450,00	Rp 57.047.147.873,00	93,67	24.222.134.502,00
43	Bantuan Sosial	V.1.2.a.5)	450.000.000,00	Rp 450.000.000,00	100,00	3.797.490.222,00
44	Jumlah Belanja Operasi		807.628.215.705,00	749.871.597.251,00	92,85	648.680.446.262,00
46	BELANJA MODAL	V.1.2.b				
47	Belanja Tanah	V.1.2.b.1)	8.777.082.925,00	Rp 6.993.328.488,00	79,68	3.899.361.762,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	V.1.2.b.2)	46.699.391.400,00	Rp 39.299.476.604,00	84,15	46.856.230.460,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	V.1.2.b.3)	135.549.606.185,00	Rp 119.256.011.812,00	87,98	113.049.272.000,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	V.1.2.b.4)	168.016.181.505,00	Rp 157.823.831.433,00	93,93	130.424.943.817,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.1.2.b.5)	3.752.845.500,00	Rp 2.320.650.500,00	61,84	745.770.000,00
52	Belanja Aset Lainnya	V.1.2.b.5)	0,00	Rp 0,00		2.786.801.230,00
53	Jumlah Belanja Modal		362.794.907.515,00	325.693.298.837,00	89,77	297.822.399.349,00
55	BELANJA TAK TERDUGA	V.1.2.c				
56	Belanja Tak Terduga	V.1.2.c	1.500.000.000,00	Rp 383.500.000,00	25,57	372.650.000,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		1.500.000.000,00	383.500.000,00	25,57	372.650.000,00
58	JUMLAH BELANJA		1.171.923.123.220,00	1.075.948.396.088,00	91,81	946.875.495.611,00
60	TRANSFER					
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
62	Bagi Hasil Pajak	V.1.2.d	45.469.704.000,00	Rp 42.967.401.982,00	94,28	0,00
63	Bagi Hasil Retribusi		0,00	Rp 0,00		0,00
64	Bagi Hasil Pendanaan Lainnya	V.1.2.e	388.157.300,00	Rp 844.287.483,00	85,44	19.996.624.776,00
65	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		46.457.861.300,00	43.711.689.465,00	94,09	19.996.624.776,00
66	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.218.380.984.520,00	1.119.660.085.553,00	91,90	966.872.120.387,00
68	SURPLUS/DEFISIT		-4.188.267.905,00	14.286.830.644,85	(341,12)	29.384.463.062,95

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	Anggaran 2015	Realisasi 2015 (Audited)	(%)	Realisasi 2014
69				Rp -		
70	PEMBIAYAAN	V.1.3		Rp -		
71				Rp -		
72	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.1.3.a		Rp -		
73	Penggunaan SLPR	V.1.3.a.1)	19.504.937.930,00	19.504.937.929,79	100,00	6.336.571.353,84
74	Pencarian Dana Cadangan		0,00	Rp -		0,00
75	Hasil Perjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	Rp -		0,00
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	Rp -		0,00
77	Jumlah Penerimaan		19.504.937.930,00	19.504.937.929,79	100,00	6.336.571.353,84
78				Rp -		
79	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.1.3.b		Rp -		
80	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	Rp -		0,00
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.1.3.b.1)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	Rp -		0,00
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	Rp -		0,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		10.316.670.025,00	2.736.064.940,00		8.716.096.487,00
85	Jumlah Pengeluaran		15.316.670.025,00	7.736.064.940,00	50,64	16.216.096.487,00
86	PEMBIAYAAN NETO		4.188.267.905,00	11.748.872.989,79	280,52	-9.879.525.133,16
87	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	V.1.3.c	0,00	26.035.703.634,64		19.504.937.929,79

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Maros, 31 Desember 2015
 BUPATI MAROS

Dr. H. HATTA RAHMAN, M



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(SETELAH AUDIT)

No	URAIAN	REF	2016		%	REALISASI 2015
			ANGGARAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.A	79.551.000.000,00	70.983.940.411,95	89,36	64.898.805.475,05
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.A.1	84.503.500.000,00	58.145.813.782,43	67,04	50.822.503.178,88
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.A.2	10.314.224.400,00	10.314.224.366,00	100,00	6.267.571.943,98
6	Lain-lain PAD yang sah	7.5.1.1.1.A.3	22.730.000.000,00	20.344.197.087,79	124,59	19.499.006.007,54
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		176.118.724.400,00	169.487.675.828,16	93,96	141.487.685.605,45
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.1.B				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan	7.5.1.1.1.B.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		23.387.987.000,00	23.149.679.642,00	103,40	17.341.563.150,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		9.101.573.000,00	4.430.802.227,00	88,26	1.940.245.234,00
13	Dana Alokasi Umum		704.125.196.000,00	704.125.188.000,00	100,00	645.209.766.000,00
14	Dana Alokasi Khusus		412.020.894.000,00	325.435.226.668,00	81,42	95.401.330.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.149.625.499.000,00	1.067.139.874.537,00	93,21	759.792.905.384,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.1.1.1.B.2				
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian		6.429.727.000,00	6.088.247.000,00	102,47	149.285.757.000,00
20	Dana Desa		52.677.286.000,00	52.677.286.000,00	100,00	23.489.704.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		59.097.023.000,00	59.245.543.000,00	100,27	172.765.461.000,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.1.B.2				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		66.307.705.041,00	53.811.282.310,80	81,15	51.388.884.808,40
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		13.587.404.802,00	5.841.576.800,00	42,89	7.589.879.600,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		79.895.109.843,00	59.652.859.110,80	74,56	58.978.764.408,40
27	Total Pendapatan Transfer		1.229.617.533.843,00	1.186.829.278.647,80	92,47	991.537.239.592,40
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.0.1.1.1.C				
30	Pendapatan Hibah		23.049.973.217,00	23.049.973.219,00	100,00	932.000.000,00
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		23.049.973.217,00	23.049.973.219,00	100,00	932.000.000,00
34	JUMLAH PENDAPATAN		1.481.786.239.460,00	1.374.596.325.494,79	92,76	1.133.946.916.197,85
35						
36	BELANJA					
37	BELANJA OPERASI	7.5.1.1.2.A				
38	Belanja Pegawai		596.572.587.828,00	588.796.479.859,00	98,70	527.259.136.234,00
39	Belanja Barang Jasa		254.479.240.854,00	208.790.027.126,00	82,05	169.115.313.144,00
40	Belanja		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Solensi		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah		16.502.258.800,00	13.755.903.200,00	83,36	57.047.147.873,00
43	Bantuan Sosial		300.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
44	Jumlah Belanja Operasi		967.354.087.482,00	911.342.416.184,00	93,49	746.871.587.251,00
45						
46	BELANJA MODAL	7.5.1.1.2.B				
47	Belanja Tanah		5.318.809.275,00	1.449.770.000,00	27,25	6.963.328.484,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin		50.800.688.517,00	45.224.411.782,00	89,02	36.299.478.604,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan		60.395.899.817,00	69.220.926.880,00	86,10	119.296.011.812,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		324.669.123.708,00	306.796.283.790,00	94,18	157.823.831.433,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya		749.859.000,00	749.859.000,00	100,00	2.320.660.500,00
52	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah Belanja Modal		442.169.086.314,00	422.449.351.452,00	91,41	325.693.288.837,00
54						
55	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.1.2.C				
56	Belanja Tak Terduga		1.000.000.000,00	885.121.750,00	88,51	383.500.000,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		1.000.000.000,00	885.121.750,00	88,51	383.500.000,00
58	JUMLAH BELANJA		1.331.012.867.796,00	1.234.447.793.386,00	92,75	1.075.948.396.088,80
59						
60						

No	URAIAN	REF	2016		%	REALISASI 2015
			ANGGARAN	REALISASI		
60	TRANSFER	7.5.1.1.3				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
62	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	42.967.401.982,00
63	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		72.871.213.700,00	51.279.877.710,00	70,27	844.267.463,00
65	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
66	Bantuan Keuangan Desa		52.677.296.000,00	52.677.296.000,00	100,00	0,00
67	Bantuan Keuangan Lainnya		988.157.300,00	807.766.287,00	81,74	0,00
68	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		126.836.667.000,00	104.765.041.997,00	82,73	43.711.809.469,00
69	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.457.649.334.796,00	1.338.212.825.383,00	91,87	1.119.868.085.553,00
70						
71	SURPLUS/DEFISIT	7.5.1.1.4	24.136.895.864,00	25.394.100.111,76	146,47	14.286.830.644,80
72						
73	PEMBIAYAAN					
74						
75	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.1.5.A				
76	Penggunaan SLRA		26.775.077.853,00	26.035.703.634,64	97,24	19.904.937.929,79
77	Pencatan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Jumlah Penerimaan		26.775.077.853,00	26.035.703.634,64	97,24	19.904.937.929,79
81						
82	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.1.5.B				
83	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		25.050.973.217,00	25.049.973.219,00	100,00	5.000.000.000,00
85	Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		25.861.000.000,00	15.754.781.328,00	60,92	2.756.064.940,00
88	Jumlah Pengeluaran		50.911.973.217,00	40.804.754.548,00	80,15	7.756.064.940,00
89	PEMBIAYAAN NETO		-24.136.895.864,00	-14.769.050.913,36	61,19	11.748.872.989,79
90	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	7.5.1.1.6	0,00	26.585.049.198,40		26.035.703.634,64

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Turikale, 22 Mei 2017

BUPATI

IR. H. M. HATTA RAHMAN, MM



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	2017		%	REALISASI 2016
			ANGGARAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.A				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.A.1	96.801.000.000,00	102.610.789.324,60	106,31	70.683.840.411,95
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.A.2	16.735.000.000,00	17.944.994.695,28	95,35	96.145.913.762,43
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.A.3	11.528.000.000,00	11.509.485.497,05	100,00	10.514.234.368,00
6	Lain-lain PAD yang sah	7.5.1.1.A.4	128.521.977.000,00	82.614.938.977,10	64,67	28.344.197.087,75
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		253.585.977.000,00	194.569.093.694,01	76,29	185.487.675.628,18
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.B				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.B.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		26.110.306.004,00	18.428.190.488,00	73,39	23.149.979.642,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		6.096.685.036,00	3.694.067.600,00	58,48	4.430.802.227,00
13	Dana Alokasi Umum		704.125.186.000,00	801.793.951.000,00	95,24	704.125.186.000,00
14	Dana Alokasi Khusus		222.563.621.000,00	169.708.481.367,00	85,27	305.455.228.866,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		997.815.877.096,00	803.546.699.475,00	84,32	1.067.130.874.537,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.1.1.B.2				
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	6.569.347.000,00
20	Dana Desa		67.073.813.000,00	67.073.813.000,00	100,00	63.677.298.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		74.573.813.000,00	74.573.813.000,00	100,00	69.246.543.000,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.B.3				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		56.068.657.763,00	59.627.620.856,00	106,05	63.811.282.310,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		7.300.000.000,00	5.121.897.800,00	70,18	5.641.576.800,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		63.368.657.763,00	64.749.518.656,00	102,43	69.452.859.110,00
27	Total Pendapatan Transfer		1.069.698.447.893,00	1.043.070.030.892,00	95,18	1.196.629.276.647,00
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.C				
30	Pendapatan Hibah		66.814.800.000,00	61.718.389.372,00	92,37	23.049.973.219,00
31	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
32	Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		66.814.800.000,00	61.718.389.372,00	92,37	23.049.973.219,00
34	JUMLAH PENDAPATAN		1.418.289.224.893,00	1.296.787.473.596,01	91,64	1.574.586.925.494,76
35						
36	BELANJA	7.5.1.2				
37	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.A				
38	Belanja Pegawai		543.753.223.120,00	520.803.626.776,00	95,81	568.798.479.950,00
39	Belanja Barang Jasa		203.417.639.483,00	248.838.770.338,00	95,15	208.700.027.126,00
40	Bunga		-	-	-	-
41	Subsidi		-	-	-	-
42	Hibah		26.973.365.750,00	22.415.366.450,00	83,41	13.756.903.200,00
43	Bantuan Sosial		6.670.000.000,00	6.670.000.000,00	95,63	-
44	Jumlah Belanja Operasi		879.644.246.353,00	799.617.993.564,00	91,04	811.542.410.184,00
45						
46	BELANJA MODAL	7.5.1.2.B				
47	Belanja Tanah		7.412.100.000,00	3.363.582.666,00	47,94	1.448.770.000,00
48	Belanja Perawatan dan Mesin		48.160.802.306,00	42.644.980.966,68	87,11	45.234.411.762,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan		155.762.073.127,00	132.768.591.150,00	85,23	69.230.626.880,00
50	Belanja Jalan, Pipa, dan Jaringan		190.510.894.080,00	179.190.809.842,00	94,05	306.798.283.750,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya		547.660.000,00	815.021.000,00	98,13	749.660.000,00
52	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
53	Jumlah Belanja Modal		403.748.999.493,00	359.172.575.515,68	89,16	422.440.291.492,00
54						
55	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.C				
56	Belanja Tak Terduga		2.000.000.000,00	200.000.000,00	10,15	605.121.790,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		2.000.000.000,00	200.000.000,00	10,15	605.121.790,00
58	JUMLAH BELANJA		1.279.693.245.846,00	1.158.193.369.079,68	90,80	1.234.447.763.386,00
59						

No	URAIAN	REF	2017		%	REALISASI 2018
			ANGGARAN	REALISASI		
60	TRANSFER	7.5.1.3				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
62	Bagi Hasil Pajak					
63	Bagi Hasil Retribusi					
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
65	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		72.296.294.110,00	46.037.949.322,00	63,43	51.279.977.710,00
66	Bantuan Keuangan Desa					
67	Bantuan Keuangan Lainnya		68.310.754.490,00	47.073.813.000,00	68,19	52.677.296.000,00
68	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		68.157.300,00	544.287.483,00	85,44	607.765.287,00
69	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		141.595.189.900,00	115.956.049.805,00	81,89	134.785.041.997,00
70	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.419.358.431.740,00	1.270.149.419.884,88	89,51	1.339.212.825.380,00
71						
72	SURPLUS/DEFISIT	7.5.1.4	35.793.187,00	24.638.095.111,13	68,911,29	35.354.190.111,78
73	PEMBAYARAN	7.5.1.5				
74						
75	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.5.A				
76	Penggunaan SALPA					
77	Penarikan Dana Cadangan		20.280.749.884,00	20.585.048.196,40	101,43	20.035.709.634,64
78	Hasil Perputan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat					
80	Jumlah Penerimaan		20.280.749.884,00	20.585.048.196,40	101,43	20.035.709.634,64
81						
82	PENBELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.5.B				
83	Pembentukan Dana Cadangan					
84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah					
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		11.000.000.000,00	10.068.119.000,00	91,53	25.049.973.219,00
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi					
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		9.321.542.891,00	4.361.673.642,00	46,79	15.754.781.328,00
88	Jumlah Pengeluaran		20.321.542.891,00	14.429.792.642,00	71,01	40.804.754.548,00
89	PEMBAYARAN NETO		(30.793.197,00)	6.155.257.556,40	(19,989,08)	(14.769.040.913,36)
90	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	7.5.1.6		20.793.312.667,55		20.595.049.198,40

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Tunikale, 24 Mei 2018

BUPATI

Ir. H.M HATTA RAHMAN, MM

RIWAYAT HIDUP



MUH. HAERIL ARIF biasa dipanggil Eril lahir di Makassar pada tanggal 16 Maret 1994 dari pasangan suami isteri Bapak Arif dan Ibu Salmia. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 54 Bonto Cina yang lulus pada tahun 2006. SMP Negeri 1 Maros lulus pada tahun 2009. SMA Negeri 4 Bantimurung-Maros lulus pada tahun 2012, dan pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan program Strata 1 dengan program studi Manajemen Keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) pada Yayasan Perguruan Islam Maros yang sekarang berganti nama menjadi Universitas Muslim Maros (UMMA). Peneliti berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Tahun 2019 dengan Judul Skripsi “**Analisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros**”.